

**RENCANA KERJA (RENJA)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN
WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. SOEKARNO HATTA No. 2 - 4 WONOSOBO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena dengan karunia-Nya maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo telah selesai menyusun dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah pada tahun anggaran 2025 yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi serta menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja.

Diharapkan dokumen Rencana Kerja ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 sehingga dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dapat memberikan manfaat bagi pelaksana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan dokumen ini masih banyak kekurangan, maka masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan guna meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sehingga terwujud peningkatan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik.

Wonosobo, 20 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP. 196809251988031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PADA TAHUN 2024	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Lalu/ 2024 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	71
BAB III TUJUAN SASARAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH	72
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah	72
3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	73
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH	89
BAB V PENUTUP	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonsobo tahun 2025 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah menyusun Rencana Kerja tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD oleh Perangkat Daerah. Perubahan renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Berpedoman pada renstra perangkat daerah yang merupakan penjabaran RPJMD dan RKPD maka disusunlah Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja serta upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Renja Sekretariat Daerah disusun guna untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026. yaitu ***“TERWUJUDNYA WONOSOBO YANG BERDAYA SAING, MAJU, DAN SEJAHTERA”***.

Maka untuk mencapai Misi Pertama yaitu ***“Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat”***, Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bagian integral perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo menyelaraskan Rencana Strategis dengan visi dan misi tersebut sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kerja penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 disamping sebagai wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 secara proporsional dan terukur, dengan menentukan jenjang tanggung jawab perencanaan, pelaksanaan, hasil dan evaluasi hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Nomor 72 tahun 2029 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perangkat Daerah disebutkan bahwa Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi :

1. Perumusan penyusunan kebijakan daerah
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah
3. Penyelenggaraan kebijakan daerah
4. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah
5. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah
7. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
8. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
9. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo terdiri dari :

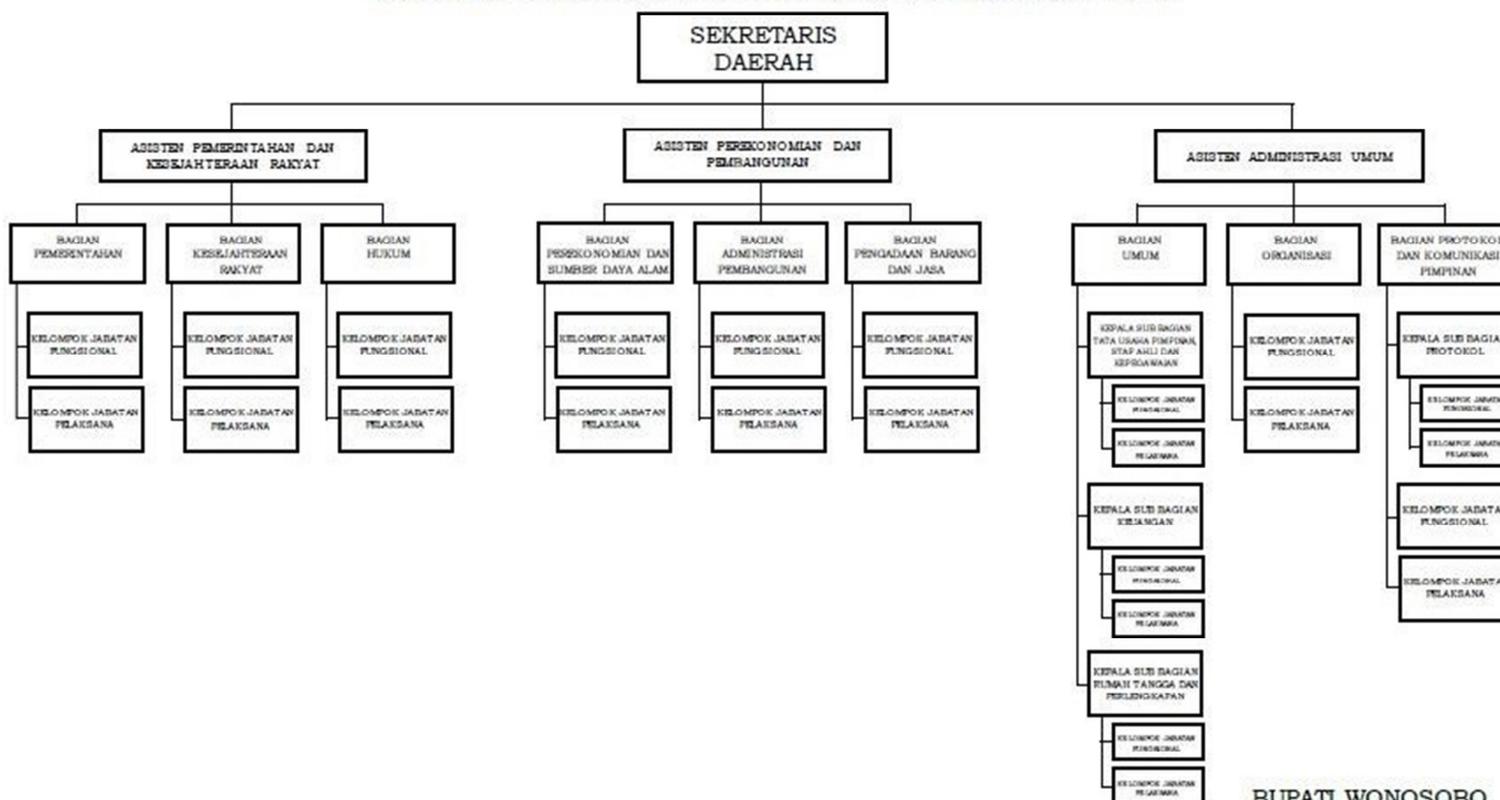
- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) Bagian Pemerintahan
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat
 - 3) Bagian Hukum
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Umum
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - 2) Bagian Organisasi
 - 3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - a) Sub Bagian Protokol;
- e. Kelompok jabatan fungsional dan
- f. Kelompok jabatan pelaksana

Apabila dilihat dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 10 TAHUN 2022

BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo

(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2023-2043
- 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026;
- 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
- 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan penyelenggaraan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo ini bertujuan:

- 1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025.
- 2. Sebagai bahan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajiaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan
Bab II	Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024

	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bab III	Tujuan Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2024
	3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kinerja Sekretariat Daerah
	3.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Bab IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah
Bab V	Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun lalu (2023) dan capaian Renstra Sekretariat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan sekretariat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun sebelumnya atau yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2023 tersebut dapat dilihat pada tabel 1. di bawah ini, Dimana Sekretariat Daerah Wonosobo sesuai dengan Rensta 2021-2016 memiliki 3 tujuan dan 3 sasaran serta masing-masing tujuan memiliki program, kegiatan serta sub kegiatan

1. Tujuan 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel
Sasaran. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel
 - A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Tata Pemerintahan)
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 2. Fasilitasi Kerjasama Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)
 - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
 3. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - B. Program Perekonomian Dan Pembangunan
 1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian (Bagian Perekonomian dan SDA)
 - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD
 - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
 2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (Bagian Perekonomian dan SDA)
 - Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

3. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Bagian Abang)
 - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- C. Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)
 1. Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
2. Tujuan 2. Mewujudkan Pemerintahan yang kapabel
Sasaran. Terwujudnya Pemerintahan yang kapabel
 - A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 1. fasilitasi dan koordinasi hukum (Bagan Hukum)
 - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - Fasilitasi Bantuan Hukum
 - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - B. Program Perekonomian dan Pembangunan
 1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (Bagian PBJ)
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik
 - Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - C. Program Administrasi Umum/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)
 1. Penataan Organisasi (Bagian Organisasi)
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
3. Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Sasaran. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)
 1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyediaan ahan/Material
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Mebel
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan Aset tetap lainnya
6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Pelaksanaan Medical Check Up kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
7. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
8. Penataan organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
9. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi keprotokolan
 - Fasilitasi komunikasi pimpinan
 - Pendokumentasian tugas Pimpinan

- B. Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)
 - 1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - Fasilitasi Keprotokolan
 - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - Pendokumentasian Tugas Pimpinan
 - 2. Penataan Organisasi
 - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- A. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1. Administrasi Tata Pemerintahan (Bagian Tata Pemerintahan)
 - Penataan administrasi pemerintahan

		dengan kebijakan								
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100%	100%	100%	77,01%	77,01%	100%		
4.01.02.2,01	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 Dokumen							
4.01.02.2,01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	48 Dokumen							
4.01.02.2,01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	307 dokumen							
4.01.02.2,04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	15 Dokumen	13 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	15 Dokumen		
4.01.02.2,04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	13 Dokumen	15 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	15 Dokumen		
4.01.02.2,02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang	100%	100%	100%	77,01%	77,01%	100%		

		ditindaklanjuti								
4.01.02.2,02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen							
4.01.02.2,02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	6 Dokumen							
4.01.02.2,02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan,	6 Dokumen							

		Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%	70%	100%	70%	70%	100%		
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%	83,72%	80%	92,12%	92,12%	85%		
4.01.03.2,01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tertangani	100%		100%			100%		
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%	70%	100%	70%	70%	100%		
4.01.03.2,01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan	12		12 Dokumen			12 Dokumen		

	dan BLUD	Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen							
4.01.03.2,01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan		12 Laporan			12 Laporan		
4.01.03.2,04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan yang tertangani	100%		100%			100%		
4.01.03.2,04.01	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12 Dokumen		12 Dokumen			12 Dokumen		
4.01.03.2,04.02	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	100 Dokumen		100 Dokumen			100 Dokumen		
4.01.03.2,02.01	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%	83,72%	80%	92,12%	92,12%	85%		
4.01.03.2,02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen		

		Program Pembangunan Daerah								
4.01.03.2,02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	4 laporan						
4.01.03.2,02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan	18 Laporan						
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)									
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	73,00 nilai	70,80 Nilai	70,00 nilai	70,80 nilai	70,80 nilai	71 nilai		
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	71,00 angka	70,80 Nilai	68,00 nilai	70,80 nilai	70,80 nilai	70 angka		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen		dokumen					
Tujuan 2. Mewujudkan Pemerintahan yang kapabel										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
		Persentase peraturan daerah yang	100%	66,67%	100%	80%	80%	100%		

		ditindaklanjuti dengan peraturan bupati								
4.01.02.2.03	fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	100%		100%			100%		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	13 dokumen	12 dokumen	13 dokumen			13 dokumen		
	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	1 kasus	kasus	Kasus		kasus		
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	12 dokumen	dokumen	dokumen		dokumen		
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	95 %	33,50%	85%	69.70%		90 %		
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	33,50%	85%	69.70%				
		Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	12 Nilai		6 nilai			9 nilai		
		Tingkat Kematangan UKPBJ	71,25 Nilai	71,25 nilai	71,25 nilai			71,25 Nilai		

	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jas	12 Dokumen		12 dokumen			12 dokumen		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen		12 dokumen			12 dokumen		
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang		200 orang			200 orang		
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)									
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	73,00 Nilai	70,80 nilai	70 nilai	70,80%		71 nila		
	Penataan Organisas	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	71 angka	70,80 nilai	68 nilai	70,80%		70 angka		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen		12 dokumen			12 dokumen		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan		12 laporan			12 laporan		
Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik										
4.1.01	PROGRAM PENUNJANG RUSAN PEMERINTAHAN DEARAH KABUPATEN/KOTA (NON URUSAN)									
		Persentase aset Sekretariat Daerah	100%		100%			100%		

		dalam kondisi baik							
		Persentase Pemenuhan Sarpras pendukung kinerja	100%		100%			100%	
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%		100%			100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%		100%			100%	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bln		Orang/bln			Orang/bln	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 dokumen			1 dokumen	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100%		100%			100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket			7 Paket	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan	9 Paket		9 Paket			9 Paket	

		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket		5 Paket			5 Paket	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket			2 Paket	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket			9 Paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	9 Dokumen		9 Dokumen			9 Dokumen	
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24 Laporan		24 Laporan			24 Laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan		9 Laporan			9 Laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik	100 %		100%			100%	

		Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit		3 Unit			3 Unit		
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit			3 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit			2 Unit		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit			3 Unit		
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	1 Unit		1 Unit			1 Unit		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	9 Laporan		9 Laporan			9 Laporan		

		Surat Menyurat							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	18 Laporan		18 Laporan			18 Laporan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan			2 Laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa playanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan		8 Laporan			8 Laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%			100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit			3 Unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara	7 Unit		7 Unit			7 Unit	

	Operasional atau Lapangan	dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit			5 Unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		6 Unit			6 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5 Unit		5 Unit			5 Unit		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit			2 Unit		
	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit			1 Unit		
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100%		100%			100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bln		2 Orang/bln			2 Orang/bln		

	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket		10 Paket			10 Paket		
	Pelaksanaan Medical Check Up kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang		2 Orang			2 Orang		
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/bln		2 Orang/bln			2 Orang/bln		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%		100%			100%		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket		
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			1 Paket		

	Penataan organisasi	Jumlah kebijakan penataan organisasi yang dipublikasikan	-		100%			-		
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-		12 dokumen			-		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-		12 laporan			-		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan inerja dan Reformasi Birokrasi	-		12 dokumen			-		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	-	NA	100 angka			-		
		Nilai kepuasan layanan kehumasan	-	NA	100 angka			-		
	Fasilitasi keprotokolan	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-		12 laporan			-		
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-		12 laporan			-		
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-		1 laporan			-		
4.01.01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)									
		Persentase kegiatan	100%	88,22%	100%	96,25		100%		

		pemerintahan daerah yang dipublikasikan							
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	73 Nilai	70,80%	70 nilai	70,80%		71 nilai	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	78,30 angka		78,10 angka			78,20 angka	
		Nilai layanan kehumasan	77,10 angka		76,90 angka			77,00 angka	
	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 Laporan		12 laporan			12 laporan	
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 laporan			12 laporan	
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12 Laporan		12 laporan			12 laporan	
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	73,00 Angka	70,80	70,00 angka			71,00 angka	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan		12 laporan			12 laporan	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT								
		Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	100%	97,50%	100%	99,28%		100%	
	Administrasi a Pemerintahan	Tat Jumlah kebijakan administrasi tata	46 Dokumen	46 dokumen	46 dokumen	46 dokumen		46 dokumen	

		pemerintahan dipublikasikan	Dokumen							
	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	46 Dokumen	46 dokumen	46 dokumen	46 dokumen		46 dokumen		



Berdasarkan tabel 2.1 di atas dapat kita evaluasi bahwa dari 15 Indikator pada program yang ada di Sekretariat Daerah apabila dibandingkan dengan tahun 2022 maka pada tahun 2023 ada yang mengalami kenaikan, tetap, bahkan ada yang mengalami penurunan.

Pada Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diampu oleh 3 (tiga) Bagian yaitu Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Bagian Kesejahteraan Rakyat serta Bagian Hukum, dengan jumlah total 5 indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama
Capaian kinerja indikator Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama pada tahun 2022 hanya sebesar 70% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2023 ini mengalami peningkatan yaitu 96,43%. Hal ini disebabkan adanya pembentukan Mal Pelayanan Publik sehingga banyak penyusunan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan instansi Vertikal. Namun demikian masih ada satu kerjasama yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dikarenakan perangkat daerah terkait belum mengajukan permohonan penyusunan perjanjian kerjasama
2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan.
Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan baik pada tahun 2023 maupun pada tahun sebelumnya 2022 telah sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%, hal ini dikarenakan surat masuk selalu dikoordinasikan dan segera ditindaklanjuti dengan kebijakan
3. Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar.
Pada Indikator Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar dari target kinerja sebesar 100% di tahun 2022 terealisasi sebesar 97,50%, sedangkan di tahun 2023 terealisasi 99,28%. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kinerja urusan wajib pelayanan dasar oleh Perangkat Daerah Pengampu.
4. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan
Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% pada tahun 2022, namun pada tahun 2023 justru mengalami penurunan hanya tercapai 77,01% dari target yang ditentukan sebesar 100% di tahun 2023. hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi bagian kesejahteraan rakyat, belum optimalnya perencanaan bagian kesejahteraan rakyat dalam merencanakan penyusunan kebijakan, kurangnya kompetensi SDM Bagian Kesra dalam mengakomodir dan menindaklanjuti kebijakan hasil koordinasi bersama perangkat daerah untuk meningkatkan capaian indikator Bagian Kesra.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator Bagian Kesra Tahun 2024 yakni penambahan SDM Bagian Kesra dan meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dibawah koordinasi Bagian Kesra. Selain itu, Bagian Kesra juga memastikan penyusunan kebijakan di Tahun 2024 agar dapat perencanaan penyusunan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan provinsi.

5. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Pada indikator Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati capaiannya di tahun 2022 hanya 66,67% artinya belum sesuai dengan target tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari 18 Peraturan Daerah yang ada 14 yang sudah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati, sedangkan sisanya sejumlah 4 (empat) Peraturan Daerah belum ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati. Ke 4 (empat) Peraturan Daerah tersebut antara lain: *Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Global Dharma Asri, Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika*

Sedangkan di tahun 2023 tercapai 80% dari target 100% artinya pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding capaian di tahun 2022. Adanya peningkatan di tahun 2023 dikarenakan beberapa Perangkat Daerah yang berinisiatif dan berkoordinasi aktif dalam penyusunan rancangan Peraturan Bupati yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah.

Program Perekonomian dan Pembangunan juga diampu oleh 3 Bagian yakni Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dengan total 5 indikator.

1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti
Capaian kinerja indikator persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti di tahun 2023 maupun tahun 2022 sama yaitu 100% dari target yang ditentukan 100%. ketercapaian ini karena yang ditindaklanjuti sudah sesuai dengan kebijakan atau aturan yang ada sehingga dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator tetap berpedoman kepada kebijakan yang telah ada.
2. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan
Indikator rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan baik di tahun 2022 maupun di tahun 2023 dapat melampaui target yang ditentukan 80%. Pada tahun 2022 tercapai 83,72%, sedangkan pada tahun 2023 tercapai 92,12%. Hal ini dikarenakan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan juga dilakukan pemantauan kinerjanya pada setiap triwulan.
3. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan

Capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan pada tahun 2022 maupun 2023 sudah sesuai dengan target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini karena adanya sinergi yang baik dengan perangkat daerah terkait dan juga komitmen pimpinan.

4. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP

Capaian kinerja indikator Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP baik di tahun 2022 maupun tahun sebelumnya 2023 sama yaitu hanya 70,00% dari target yang telah ditentukan 100%, artinya baik di tahun 2022 maupun 2023 belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan target dan capaian opini audit KAP di tahun 2022 masih merupakan hasil audit atas kinerja BUMD tutup buku tahun 2021, begitu juga hasil audit atas kinerja BUMD tutup buku tahun 2023 masih dalam proses dan akan selesai dilakukan pada triwulan satu tahun 2024. Selain itu terdapat kekosongan jabatan direktur dan dewan pengawas pada dua BUMD (PD Bahkti Husada dan PT Bima Lukar)

5. Indeks tata kelola pengadaan

Penilaian indeks tata kelola pengadaan minimal baik diperoleh melalui indikator pemanfaatan sistem pengadaan, kualifikasi & kompetensi SDM PBJ, dan tingkat kematangan UKPBJ. Capaian kinerja indeks tata kelola pengadaan pada tahun 2022 dengan nilai 33,50 (predikat kurang) belum mencapai target yang telah ditentukan yaitu >70 s.d 90 dengan predikat baik.

Rendahnya indeks tata kelola pengadaan disebabkan karena pada indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ di tahun 2022 masih rendah, dari kebutuhan JF PPBJ sebanyak 25 orang hanya terdapat 9 orang pada UKPBJ Kabupaten Wonosobo. Selain hal tersebut, disebabkan juga pada indikator tingkat kematangan UKPBJ yang belum memenuhi target tingkat kematangan UKPBJ dengan level 3 (proaktif). Capaian kematangan UKPBJ di tahun 2022 masih pada level 1 (inisiasi).

Capaian kinerja indeks tata kelola pengadaan pada tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022, yaitu kategori cukup dengan nilai 69,70. Kendala capaian ITKP pada tahun 2023 adalah masih belum terpenuhinya kebutuhan JF PPBJ sebanyak 25 orang.

Predikat Indeks tata kelola pengadaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Indeks Tata Kelola Pengadaan

Nilai	Predikat
100	Istimewa
> 90 s.d <100	Sangat Baik
> 70 s.d 90	Baik
≥ 50 s.d 70	Cukup
< 50	Kurang

Sumber data : Bagian PBJ Kabupaten Wonosobo berdasar LKPP

Program Administrasi Umum/Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Urusan).

Program Administrasi Umum/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Urusan) diampu oleh 2 (dua) Bagian Yakni Bagian Organisasi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim)

Indikator pada program ini sebanyak 2.

1. Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah

Capaian kinerja indikator rata-rata nilai Reformasi Birokrasi (RB) Perangkat Daerah di tahun 2022 tercapai 70,80 dari target 68. Pada tahun 2023 tercapai 70,80 dari target nilai yang ditetapkan 70. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan implementasi kebijakan ketatalaksanaan (proses bisnis) di lingkup Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta terlaksananya pengukuran kepuasan masyarakat yang terdigitalisasi.

Namun demikian dalam pelaksanaannya tetap masih dijumpai adanya hambatan yakni perlunya peningkatan koordinasi dan kinerja tim RB dalam pendampingan pengisian LKE secara intens terhadap seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Wonosobo serta penguatan komitmen pimpinan terhadap Pembangunan RB di lingkungan kerjanya.

Secara rinci rata-rata nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Trend Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Tahun	RB atas penilaian	Predikat	Keterangan
2019	NA	NA	Belum ada penilaian
2000	NA	NA	Belum ada penilaian
2021	62,15	Baik	
2022	70,80	Sangat baik	
2023	70,80	Sangat baik	

Interval penilaian Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

No	Predikat	Nilai Absolut	Interprestasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>70 - 80	Sangat baik
4.	B	>60 - 70	Baik
5.	CC	>50 - 60	Cukup memadai

Sumber data : Bagian Organisasi Setda Wonosobo berdasar Kementerian PAN RB

2. Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan,

Capaian kinerja indikator Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan pada tahun 2022 tercapai 88,22%, sedangkan tahun 2023 tercapai 96,25%, artinya baik di tahun 2022 maupun 2023 belum mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%, namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2022, capaian ditahun 2023 mengalami peningkatan.

Tidak tercapainya target yang ditentukan ini disebabkan oleh kurangnya SDM serta sarana dan prasarana yang dimiliki, dalam melaksanakan tugas dokumentasi dan liputan kegiatan pemerintah daerah, dalam hal ini adalah fasilitasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah, yakni Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah. Namun demikian, pelaksanaan fasilitasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah tetap dilaksanakan, dengan prioritas pada kegiatan pemerintahan, menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

Dalam bagian ini disajikan capaian kinerja pelayanan sekretariat daerah berdasarkan indikator kinerja Program yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Pada pembahasan sub bab ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja sekretariat daerah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Sekretraiat Daerah
Kabupaten Wonosobo Provnsi Jawa Tengah

No	Program/Indikator Program	SPM/Stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat											
A.	Bagian Pemerintahan											
	a. Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama			100%	100%	100%	100%	96,43		100%	100%	
	b. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bagian pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	c. Persentase ketercapaian SPM pelayanan dasar			100%	100%	100%	100%	99,28%		100%	100%	
B.	Bagian Kesejahteraan Rakyat											
	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan			100%	100%	100%	100%	77,01%		100%	100%	
C.	Bagian Hukum											
	a. Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati			100%	100%	100%	100%	80%		100%	100%	

No	Program/Indikator Program	SPM/Stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan											
A.	Bagian Administrasi Pembangunan											
	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagain Pengendalian Pembangunan yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	b. Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah per triwulan			80%	85%	85%	90%	92,12%		85%	85%	
B	Bagian Perekonomian dan SDA											
	a. Persentase rekomendasi hasil koordinasi perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti kebijakan			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	b. Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP			100%	100%	100%	100%	70,00%		100%	100%	
C	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa											
	a. Indeks tata kelola pengadaan			85	90	95		69,70		90	95	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)											

No	Program/Indikator Program	SPM/Stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
.	Bagian Umum											
	a. Persentase aset perangkat daerah dalam kondisi baik			100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	
	b. Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja			100%	100%	100%	100%	-		100%	100%	
	c. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
4.	Program Administrasi Umum/ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)											
A.	Bagian Organisasi											
	a. Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah			70	71	73	73	70,80		70,80	70,80	
B.	Bagian Prokompim											
	a. Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan,			100%	100%	100%	100%	96,25%		100%	100%	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH

Dalam menjalankan kegiatannya, sekretariat daerah Kabupaten Wonosobo masih banyak menghadapi hambatan/kendala antara lain :

1. Internal

- a. kurang optimalnya kompetensi dan kualifikasi SDM aparatur baik dari sisi kualitas maupun kuantitas serta penegakan disiplin aparatur yang kurang intensif
- b. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan
- c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja
- d. Penerapan pemanfaatan TI dalam tata kelola administrasi yang kurang maksimal
- e. Belum tersusunnya kebijakan sebagai panduan Pembangunan Reformasi Birokrasi yang spesifik serta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.
- f. Kurang cepatnya Perangkat Daerah dalam menindaklanjuti hasil MOU dengan Perjanjian Kerjasama (PKS)
- g. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) masih rendah, yaitu baru tercapai di angka/skor 69,70 (cukup) di awal tahun 2024, sedangkan target yang ditetapkan di RPJMD pada indikator tujuan di tahun 2023 yaitu sebesar 85 (baik)
- h. Pemenuhan kebutuhan kompetensi SDM PPBJ sesuai dengan ketentuan pasal 74A Perpres 12 tahun 2021 masih sangat rendah. JF PPBJ dari total kebutuhan sesuai dengan rekomendasi formasi LKPP yaitu sebesar 25 orang baru terpenuhi 17 orang (sudah dengan rekrutmen PPPK tahun 2024). Sedangkan untuk kebutuhan personal lainnya yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP) yang tersebar di OPD diawal tahun 2024 baru terdapat 1 (satu) yang memiliki kompetensi

2. Eksternal

- a. Sering terjadinya perubahan sistem/perubahan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan akibat dari perkembangan dinamika pada sistem pemerintahan
- b. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai penataan birokrasi dan organisasi daerah
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung kinerja daerah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, perlu adanya upaya pemecahan sehingga tidak mempengaruhi kinerja pada tahun berikutnya. Upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM (personel) yang ada diantaranya mutasi pejabat dan staf, pengajuan formasi jabatan yang dibutuhkan di sekretariat daerah, penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan baik di dalam daerah maupun mengikuti di luar daerah
- 2) Penentuan prioritas pemenuhan anggaran terhadap kegiatan-kegiatan yang secara signifikan mendukung pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU)
- 3) Peningkatan kualitas penyediaan sarana-prasarana melalui pemetaan

- kebutuhan, penambahan sarana prasarana melalui pengadaan, dan pemeliharaan/rehabilitasi sarana prasarana
- 4) Penerapan Teknologi Informasi perlu dimaksimalkan dalam tata kelola pemerintahan guna mendukung kinerja yang efektif dan efisien
 - 5) Menyusun rencana kerja atau rencana aksi serta meningkatkan koordinasi pembahasan kebijakan Pembangunan di bidang Reformasi Birokrasi
 - 6) Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan terhadap Perangkat Daerah yang berkaitan dengan SOP MOU/PKS.
 - 7) Percepatan pemenuhan target seluruh indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang terdiri dari
 - a. Indikator pemanfaatan sistem pengadaan, dilakukan dengan tertib pemanfaatan SPSE mulai dari perencanaan pengadaan sampai dengan input hasil pekerjaan serta pemberian rating kepada penyedia
 - b. Indikator kompetensi SDM PBJ, dilakukan dengan memenuhi seluruh jumlah SDM PBJ sesuai dengan rekomendasi formasi LKPP melalui rekrutmen dan perpindahan jabatan dari jabatan lain
 - c. Indikator tingkat kematangan UKPBJ, dilakukan dengan memenuhi seluruh aspek dan sarpras yang dibutuhkan
 - 8) Melaksanakan sertifikasi pelatihan pengadaan barang dan jasa PPK tipe C dan sertifikasi level 1 melalui *Massive Open Online Courses* (MOOC), Blended learning dengan memanfaatkan pelatihan yang disediakan oleh LKPP ataupun Lembaga yang terakreditasi lainnya.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, mewujudkan pemerintahan yang kapabel dan peningkatan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu didukung dengan program dan kegiatan.

Review terhadap rancangan awal RKPD adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk meninjau ulang apakah program dan kegiatan yang sudah disusun dalam rancangan awal RKPD sesuai dengan kebutuhan riil Perangkat Daerah yang ada di lapangan. Hasil review tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3 (review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025)

Analisis Kebutuhan Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik											
	Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten/Kota (NON URUSAN)				16.777.338.943	Program Penunjang Urusan Pemeintahan Daerah Kabupaten/Kota(NON URUSAN)				16.777.338.943	Semua bagian
		Wsb	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100%			Wsb	Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	100%		
		Wsb	Persentase pemenuhan sarprsa pendukung kinerja	100%			Wsb	Persentase pemenuhan sarprsa pendukung kinerja	100%		
		Wsb	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%			Wsb	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wsb	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	369.826.743	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Wsb	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100%	369.826.743	Umum
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bln	350.626.743	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /Bln	350.626.743	Umum

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Wsb	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19.200.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Wsb	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19.200.000	Hukum
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wsb	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100%	5.184.568.752	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Wsb	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	100%	5.184.568.752	Umum,
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wsb	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	95.101.944	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Wsb	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	95.101.944	Umum
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	251.730.927	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	9 Paket	251.730.927	Bagian Umum, Pemerintahan, Kesra, Hk, Perekonomian, Pbj. Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Peralatan dan perlengkapan kantor (ATK & Kertas Cover)	1 Paket	63.401.296		Wsb	Peralatan dan perlengkapan kantor (ATK & Kertas Cover)	1 Paket	63.401.296	Umum
		Wsb	perlengkapan kantor (ATK)	1 Paket	19.334.200		Wsb	perlengkapan kantor (ATK)	1 Paket	19.334.200	Pemerintahan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	15.371.037		Wsb	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	15.371.037	Kesra
		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	15.117.500		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	15.117.500	Hukum
		Wsb	Tersedianya ATK	1 Paket	156.700.155		Wsb	Tersedianya ATK	1 Paket	156.700.155	Perekonomian
		Wsb	Pengadaan ATK	1 Paket	19.000.000		Wsb	Pengadaan ATK	1 Paket	19.000.000	PBJ
		Wsb	Pembelian ATK	1 Paket	10.275.494		Wsb	Pembelian ATK		10.275.494	Adbang
		Wsb	ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, pigura dan souvenir	1 Paket	32.615.000		Wsb	ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, pigura dan souvenir	1 Paket	32.615.000	Prokompim
		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	11.850.000		Wsb	Penyediaan ATK	1 Paket	11.850.000	Organisasi
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wsb	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	82.421.685	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Wsb	jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	82.421.685	Umum
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wsb	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.020.389	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Wsb	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	19.020.389	Umum
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda	Wsb	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	280.843.628	Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda	Wsb	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	280.843.628	Bag. Umum, Pemerintahan, Kesra, Hk, Perekonomian,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaia n	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
											PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	jumlah Barang dan Cetak dan Penggandaan	1 Paket	57.061.166		Wsb	jumlah Barang dan Cetak dan Penggandaan	1 Paket	57.061.166	Umum
		Wsb	Fotocopi, belanja penyediaan bahan undangan hari jadi	1 Paket	16.495.062		Wsb	Fotocopi, belanja penyediaan bahan undangan hari jadi	1 Paket	16.495.062	Pemerintahan
		Wsb	Barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	6.000.000		Wsb	Barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	6.000.000	Kesra
		Wsb	Penyediaan cetak keperluan kantor	1 Paket	15.134.000		Wsb	Penyediaan cetak keperluan kantor	1 Paket	15.134.000	Hukum
		Wsb	cetak dan penggandaan	1 Paket	8.500.000		Wsb	cetak dan penggandaan	1 Paket	8.500.000	Perekonomian
		Wsb	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	17.000.000		Wsb	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	1 Paket	17.000.000	PBJ
		Wsb	Cetak dan fotocopy	1 Paket	12.000.000		Wsb	Cetak dan fotocopy	1 Paket	12.000.000	Adbang
		Wsb	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	135.303.400		Wsb	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	135.303.400	Prokompim
		Wsb	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	13.350.000		Wsb	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	13.350.000	Organisasi
	Penyediaan Bahan Bacaan	Wsb	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	9 Doku	77.149.907	Penyediaan Bahan Bacaan	Wsb	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan	9 Doku	77.149.907	Bag. Umum, Pemerintahan,

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Peraturan Perundang- undangan		Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	men		dan Peraturan Perundang- undangan		Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	men		Kesra, Hk, Perekonomian,P BJ, Adbang, Prokompim, Organisasi.
		Wsb	jumlah Bahan Bacaan Mass Media Nasional dan Lokal	1 Doku men	44.380.907		Wsb	jumlah Bahan Bacaan Mass Media Nasional dan Lokal	1 Doku men	44.380.907	Umum
		Wsb	langganan Kompas dan Suara Merdeka	1 Doku men	2.400.000		Wsb	langganan Kompas dan Suara Merdeka	1 Doku men	2.400.000	Pmerintahan
		Wsb	Koran, bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	1.200.000		Wsb	Koran, bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	1.200.000	Kesra
		Wsb	Penyediaan buku peraturan perundang- undangan dan langganan koran	1 Doku men	13.820.000		Wsb	Penyediaan buku peraturan perundang- undangan dan langganan koran	1 Doku men	13.820.000	Hukum
		Wsb	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	1.980.000		Wsb	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	1 Doku men	1.980.000	Perekonomian
		Wsb	Bahan bacaan surat kabar najalah	1 Doku men	1.500.000		Wsb	Bahan bacaan surat kabar najalah	1 Doku men	1.500.000	PBJ

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Bahan bacaan (koran)	1 Dokumen	2.220.000		Wsb	Bahan bacaan (koran)	1 Dokumen	2.220.000	Adbang
		Wsb	Jawa Pos, KR, Republika Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	1 Dokumen	7.249.000		Wsb	Jawa Pos, KR, Republika Suara Merdeka, Wonosobo Ekspres	1 Dokumen	7.249.000	Prokompim
		Wsb	Penyediaan koran/surat kabar	1 Dokumen	2.400.000		Wsb	Penyediaan koran/surat kabar	1 Dokumen	2.400.000	Organisasi
	Penyediaan Bahan/Material	Wsb	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	95.101.944	Penyediaan Bahan/Material	Wsb	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	95.101.944	Umum
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Wsb	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	1.841.223.328	Fasilitas Kunjungan Tamu	Wsb	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	24 Laporan	1.841.223.328	Umum
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wsb	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	2.441.975.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wsb	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 Laporan	2.441.975.000	Bag.Umum, Pemerintahan, Kesra, Hk, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Jumlah perjalanan dinas pimpinan di dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	1.200.000.000		Wsb	Jumlah perjalanan dinas pimpinan di dalam dan luar Provinsi Jawa Tengah	1 Laporan	1.200.000.000	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	uang lembur, makan minum apat	1 Laporan	178.770.000		Wsb	uang lembur, makan minum apat	1 Laporan	178.770.000	Pemerintahan
		Wsb	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	52.925.000		Wsb	Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan	52.925.000	Kesra
		Wsb	Perjalanan dinas luar daerah, makan minum rapat	1 Laporan	100.000.000		Wsb	Perjalanan dinas luar daerah, makan minum rapat	1 Laporan	100.000.000	Hukum
		Wsb	Terselenggaranya rapat koordinasi, terselenggaranya rapat koordinasi luar daerah	1 Laporan	100.000.000		Wsb	Terselenggaranya rapat koordinasi, terselenggaranya rapat koordinasi luar daerah	1 Laporan	100.000.000	Perekonomian
		Wsb	Laporan Koordinasi dan/konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum rapat	1 Laporan	150.000.000		Wsb	Laporan Koordinasi dan/konsultasi ke luar daerah, penyediaan makan minum rapat	1 Laporan	150.000.000	PBJ
		Wsb	makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah	1 Laporan	82.780.000		Wsb	makan minum rapat, perjalanan dinas luar daerah	1 Laporan	82.780.000	Adbang
		Wsb	Penyediaan makanan dan minuman, rapat kooerdinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	457.500.000		Wsb	Penyediaan makanan dan minuman, rapat kooerdinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 Laporan	457.500.000	Prokompim
		Wsb	Penyelenggaraan	1	120.000.000		Wsb	Penyelenggaraan	1	120.000.000	Organisasi

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			rapat rapat dan perjalanan dinas	Laporan				rapat rapat dan perjalanan dinas	Laporan		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wsb	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	957.923.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Wsb	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	957.923.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	657.923.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	657.923.000	Bag. Umum, Kesra,PBJ, Adbang, Prokomp
		Wsb	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana	Unit	250.000.000		Wsb	Jumlah Pengadaan Sarana dan prasarana	Unit	250.000.000	Umum
		Wsb	Jumla Pengadaan Prnter	1 Unit	3.000.000		Wsb	Jumla Pengadaan Prnter	1 Unit	3.000.000	Kesra
		Wsb	jumlah Pengadan laptop	3 Unit	30.000.000		Wsb	Jumlah pengadaan laptop	3 Unit	30.000.000	PBJ
		Wsb	Jumlah pengadaan laptop	2 Unit	22.000.000		Wsb	jumlah pengadaan laptop	2 Unit	22.000.000	Adbang
		Wsb	jumlah pengadaan peralatan dan mesn lainnya	12 Unit	352.923.000		Wsb	Jumlah pengadaan peralatan dan mesn lainnya	12 Unit	352.923.000	Prokomp

	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	Umum
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	Umum
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	-	Umum
	Pengadaan Mebel	Wsb	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	Unit	300.000.000	Pengadaan Mebel	Wsb	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	Unit	300.000.000	Umum
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.846.330.506	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.846.330.506	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 laporan	25.635.124	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 laporan	25.635.124	Bag. Umum, Kesra, Hk, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Wsb	Jumlah administrasi surat menyurat tertangani	1 Laporan	15.850.323		Wsb	Jumlah administrasi surat menyurat tertangani	1 Laporan	15.850.323	Umum
		Wsb	Materai, amplop	1 Laporan	1.000.000		Wsb	Materai, amplop	1 Laporan	1.000.000	Kesra
		Wsb	Penyediaan benda pos	1 Laporan	1.500.000		Wsb	Penyediaan benda pos	1 Laporan	1.500.000	Hukum
		Wsb	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.600.000		Wsb	Penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	1.600.000	Perekonomian
		Wsb	Pembelian materei	1 Laporan	1.000.000		Wsb	Pembelian materei	1 Laporan	1.000.000	PBJ
		Wsb	Pembelian materei	1 Laporan	1.869.801		Wsb	Pembelian materei	1 Laporan	1.869.801	Adbang
		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan, jasa surat menyurat	1 Laporan	1.815.000		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan, jasa surat menyurat	1 Laporan	1.815.000	Prokompim
		Wsb	Penyediaan materei	1 Laporan	1.000.000		Wsb	Penyediaan materei	1 Laporan	1.000.000	Organisasi
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	18 Laporan	691.078.752		Wsb	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18 Laporan	691.078.752	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Listrik		Daya Air dan Listrik yang Disediakan								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	76.741.425	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	76.741.425	Bag. Umum, Organisasi
		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	69.741.425		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	69.741.425	Umum
		Wsb	Penyediaan LCD, penyediaan peralatan komputer lainnya, penyediaan printer	1 Laporan	7.000.000		Wsb	Penyediaan LCD, penyediaan peralatan komputer lainnya, penyediaan printer	1 Laporan	7.000.000	Organisasi
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	3.052.875.205	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Wsb	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	3.052.875.205	Bag. Umum, Pmerintahan, Kesra, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor dan Jasa transaksi	1 Laporan	2.785.673.519		Wsb	Jumlah Rekening yang terbyar untuk Jasa Kebersihan, Jasa Keamanan Kantor dan Jasa transaksi	1 Laporan	2.785.673.519	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			keuangan					keuangan			
		Wsb	Honorarium pengelola uang dan penatausahaan, iuran forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Laporan	59.200.000		Wsb	Honorarium pengelola uang dan penatausahaan, iuran forsesdasi Sekda Wsb dan iuran APKASI Bupati	1 Laporan	59.200.000	Pemerintahan
		Wsb	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	1 Laporan	69.288.000		Wsb	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor	1 Laporan	69.288.000	Kesra
		Wsb	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Laporan	27.423.000		Wsb	Penyediaan jasa administrasi keuangan	1 Laporan	27.423.000	Perekonomian
		Wsb	honorarium pengelola uang dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	36.000.000		Wsb	honorarium pengelola uang dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	36.000.000	PBJ
		Wsb	Honor pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	24.930.686		Wsb	Honor pengelolaan keuangan dan penatausahaan keuangan	1 Laporan	24.930.686	Adbang
		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan	1 Laporan	30.800.000		Wsb	Penyediaan administrasi keuangan	1 Laporan	30.800.000	Prokompim
		Wsb	honorarium pengelola keuangan (KPA, Bendahara)	1 Laporan	18.960.000		Wsb	honorarium pengelola keuangan (KPA, Bendahara)	1 Laporan	18.960.000	Organisasi
	Pemeliharaan	Wsb	Persentase realisasi	100%	2.755.552.634	Pemeliharaan	Wsb	Persentase realisasi	100%	2.755.552.634	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kineja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wsb	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	597.698.269	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wsb	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	597.698.269	Bag. Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, PBJ
		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Perseorangan Dinas/Jabatan Terpeliharaan	1 Unit	512.108.423		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Perseorangan Dinas/Jabatan Terpeliharaan	1 Unit	512.108.423	Umum
		Wsb	BBM, pelumas, pemeliharaan alat mesin/service komputer, pemeliharaan kendaraan dinas	1 Unit	22.659.160		Wsb	BBM, pelumas, pemeliharaan alat mesin/service komputer, pemeliharaan kendaraan dinas	1 Unit	22.659.160	Pemerintahan
		Wsb	BBM, pelumas, Pemeliharaan alat mesin/service komputer, Pemeliharaan	1 Unit	20.930.686		Wsb	BBM, pelumas, pemeliharaan alat mesin/service komputer, pemeliharaan	1 Unit	20.930.686	Kesra

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaia n	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana (RP.000)	Catatan Penting/Keteran gan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			kendaraan dinas					kendaraan dinas			
		Wsb	Pemeliharaan suku cadang, BBM kendaraan roda 4	1 Unit	20.000.000		Wsb	Pemeliharaan suku cadang, BBM kendaraan roda 4	1 Unit	20.000.000	Hukum
		Wsb	Pemeliharaan suku cadang, BBM kendaraan roda 4	1 Unit	22.000.000		Wsb	Pemeliharaan suku cadang, BBM kendaraan roda 4	1 Unit	22.000.000	PBJ
			dan 2					dan 2			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wsb	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	721.736.871	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Wsb	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	721.736.871	Bagian Umum, Perekonomian, Adbang, Prokompim, Organisasi
		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Dinas Operasional Bagian Umum	1 Unit	588.911.015		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Kend Dinas Operasional Bagian Umum	1 Unit	588.911.015	Umum
		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas	1 Unit	9.197.155		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas	1 Unit	9.197.155	Perekonomian
		Wsb	Perawatan kendaraan bermotor	1 Unit	43.628.701		Wsb	Perawatan kendaraan bermotor	1 Unit	43.628.701	Adbang

		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	55.000.000		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	55.000.000	Prokompim
		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	25.000.000		Wsb	Pemeliharaan rutim berkala kendaraan dinas/operasional	1 Unit	25.000.000	Organsas
No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	Penting/Keteran gan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Mebel	Wsb	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	200.000.000	Pemeliharaan Mebel	Wsb	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit	200.000.000	Umum
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	143.601.295	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wsb	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	143.601.295	Bag. Umum, Pemerntaan Kesra, Hukum, Perekonomian, PBJ, Adbang, Prokompim. Organsas
		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan peralatan kantor, alat studio dan komunikasi	1 Unit	63.401.295		Wsb	Rekening yang terbyar untuk Pemeliharaan peralatan kantor, alat studio dan komunikasi	1 Unit	63.401.295	Umum
		Wsb	Pemeliharaan suku cadang dan perlengkapan peralatan kantor	1 Unit	5.000.000		Wsb	Pemeliharaan suku cadang dan perlengkapan peralatan kantor	1 Unit	5.000.000	pemerntaan
		Wsb	Terpeliharanya peralatan perkantoran	1 Unit	8.000.000		Wsb	Terpeliharanya peralatan perkantoran	1 Unit	8.000.000	Kesra

		Wsb	Pemeliharaan suku cadang dan perlengkapan peralatan kantor	1 Unit	7.500.000		Wsb	Pemeliharaan suku cadang dan perlengkapan peralatan kantor	1 Unit	7.500.000	Hukum
		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	3.000.000		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	3.000.000	Perekonomian
		Wsb	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	1 Unit	20.500.000		Wsb	Pemeliharaan rutin peralatan kantor	1 Unit	20.500.000	PBJ
		Wsb	jasa service dan penggantian komponen	1 Unit	10.000.000		Wsb	jasa service dan penggantian komponen	1 Unit	10.000.000	Adbang
		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	18.700.000		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	18.700.000	Prokompim
		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	7.500.000		Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	1 Unit	7.500.000	Organsas
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5 Unit	997.414.256	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Wsb	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	5 Unit	997.414.256	Umum
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	95.101.943	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wsb	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	95.101.943	Bag.Umum,
	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Wsb	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang	Unit	-		Wsb	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang		-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Dipelihara					Dipelihara			
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100%	1.613.137.308	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	100%	1.613.137.308	Umum
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang /Bln	727.616.437	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang /Bln	727.616.437	Umum
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	250.000.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	10 Paket	250.000.000	Umum
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	35.520.871	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	35.520.871	Umum
	Penyediaan Dana	Wsb	Jumlah Orang yang	2	600.000.000	Penyediaan Dana	Wsb	Jumlah Orang yang	2	600.000.000	Umum

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bln		Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang /Bln		
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Wsb	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%	2.050.000.000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Wsb	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	100%	2.050.000.000	Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	900.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	900.000.000	Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	650.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	650.000.000	Umum
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Wsb	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	500.000.000	Umum
	Penataan organisasi	Wsb	Jumlah kebijakan penataan organisasi yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-	
	Pengelolaan Kelembagaan dan	Wsb	Jumlah dokumen	-	-	-	-	-	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Analisis Jabatan		yang dihasilkan								
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	-	-	-	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Wsb	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	
		Wsb	Nilai kepuasan layanan kehumasan	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi keprotokolan	Wsb	jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	-	-	-	-	
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-	
	Program penunjang urusan	Wsb			1.262.188.785	Program penunjang urusan	Wsb			1.262.188.785	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)					pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)					
		WSb	Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	100%			WSb	Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	100%		
		Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai			Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Wsb	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	78,20 angka	508.888.785	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Wsb	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	78,20 angka	508.888.785	
		Wsb	Nilai layanan kehumasan	77,00 angka			Wsb	Nilai layanan kehumasan	77,00 angka		
	Fasilitasi keprotokolan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	79.537.025	Fasilitasi keprotokolan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12 laporan	79.537.025	
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		294.020.000	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		294.020.000	
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Pendokumen		135.331.760	Pendokumentasian tugas pimpinan	Wsb	Jumlah Laporan Pendokumen		135.331.760	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Indikator Kinerja Tugas Pimpinan					Indikator Kinerja Tugas Pimpinan			
	Penataan Organisasi	Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71,00 angka	753.300.000	Penataan Organisasi	Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71,00 angka	753.300.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	298.300.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan	298.300.000	
	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				4.440.768.038	Program Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				4.440.768.038	
		Wsb	Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasa	100%			Wsb	Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasa	100%		
	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokumen	462.366.638	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	46 dokumen	462.366.638	
	Penataan administrasi pemerintahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	46 dokumen	313.530.438	Penataan administrasi pemerintahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	46 dokumen	313.530.438	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan 1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel											
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				4.440.768.038	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				4.440.768.038	
		Wsb	Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/rencana kerja	100%							
		Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100%							
		WSb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian	100%							

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan								
	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 Dokumen	462.366.638	Administrasi Tata Pemerintahan	Wsb	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	48 Dokumen	462.366.638	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	48 Dokumen	76.427.200	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	48 Dokumen	76.427.200	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	307 Dokumen	72.409.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	307 Dokumen	72.409.000	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Wsb	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	15 Dokumen	84.401.400	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Wsb	jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	15 Dokumen	84.401.400	
	Fasilitasi kerjasama Dalam negeri	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	84.401.400	Fasilitasi kerjasama Dalam negeri	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	84.401.400	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang	100%	3.489.000.000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang	100%	3.489.000.000	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ditindaklanjuti					ditindaklanjuti			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	3.177.128.200	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	5 Dokumen	3.177.128.200	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	211.871.800	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	211.871.800	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	6 Dokumen	100.000.000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan	6 Dokumen	100.000.000	Kesra (Tujuan 1, Sasaran 1)

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikasi (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat		Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			
	Program Perekonomian Dan Pembangunan				2.388.465.675	Program Perekonomian Dan Pembangunan				2.388.465.675	
		Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 %			Wsb	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	100 %		
		Wsb	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%			Wsb	Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	100%		
		Wsb	persentase rekomendasi hasil	100%			Wsb	persentase rekomendasi hasil	100%		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Loka si	Indikatpr kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Loka si	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti					koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti			
		Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%			Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%		
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Wsb	Jumlah kebijakan perekonomian yang ditangani	100%	621.296.990	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Wsb	Jumlah kebijakan perekonomian yang ditangani	100%	621.296.990	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Wsb	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12 Dokumen	250.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Wsb	umlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	12 Dokumen	250.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Wsb	JumlahLaporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	371.296.990	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Wsb	JumlahLaporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	12 Laporan	371.296.990	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Wsb	Persentase kebijakan yang tertangani	100%	1.114.352.600	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Wsb	Persentase kebijakan yang tertangani	100%	1.114.352.600	
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	12 Dokumen	1.064.352.600	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan	12 Dokumen	1.064.352.600	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kelautan dan Perikanan		Pembentukan BLUD			Kelautan dan Perikanan		Pembentukan BLUD			
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	50.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%	315.000.000	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Wsb	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	85%	315.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	37.776.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen	37.776.000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	150.943.748	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	150.943.748	
	Pengelolaan Evaluasi dan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	18 Laporan	149.096.337	Pengelolaan Evaluasi dan	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan	18 Laporan	149.096.337	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	n		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	n		
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)				1.262.188.785	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (urusan)				1.262.188.785	
		Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai			Wsb	Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai		
	Penataan Organisasi	Wsb	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	70 angla	753.300.000	Penataan Organisasi	Wsb	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	70 angla	753.300.000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	155.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	155.000.000	
Tujuan 2. Mewujudkan pemerintahan yang kapabel											
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				4.440.768.038	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				4.440.768.038	
		Wsb	Persentase peraturan daerah yang	100 %			Wsb	Persentase peraturan daerah yang	100 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			ditindaklanjuti dengan peraturan bupati					ditindaklanjuti dengan peraturan bupati			
	fasilitasi dan koordinasi hukum	Wsb	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	100%	405.000.000	fasilitasi dan koordinasi hukum	Wsb	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	100%	405.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Wsb	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	120.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Wsb	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	Dokumen	120.000.000	
	Fasilitasi bantuan hukum	Wsb	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	95.000.000	Fasilitasi bantuan hukum	Wsb	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	95.000.000	
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Wsb	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	190.000.000	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Wsb	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen	190.000.000	
	Program Perekonomian Dan Pembangunan				2.388.465.675	Program Perekonomian Dan Pembangunan				2.388.465.675	
		Wsb	Indeks tata Kelola Pengadaan	90 %			Wsb	Indeks tata Kelola Pengadaan	90 %		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	315.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Indeks Tata Kelola Pengadaan	%	315.000.000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	180.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	12 Dokumen	180.000.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	55.000.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Wsb	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	55.000.000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	80.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Wsb	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	200 Orang	80.000.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)				1.262.188.785	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (urusan)				1.262.188.785	
		Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai			Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 nilai		
	Penataan Organisasi	Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 angka	753.300.000	Penataan Organisasi	Wsb	Rata-rata nilai RB Perangkat Daerah	71 angka	753.300.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting/Keterangan
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kineja	Target capaian	Pagu indikaif (Rp.000)	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Lokasi	Indikator KInerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (RP.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Wsb	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	300.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 Dokumen	300.000.000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	298.300.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	12 Laporan	298.300.000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Sesuai dengan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 tidak menangani secara langsung program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat maupun Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integral dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema rencana kerja pemerintah tahun 2025 yaitu: “Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Sedangkan untuk tema RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 ***“Peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan, didukung dengan sumber daya manusia yang berdaya saing dan lebih berkarakter”***

Dengan memperhatikan tema pembangunan nasional, tema indikatif pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2025 adalah: ***“Pemantapan Infrastruktur, Ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Daya Saing Daerah”***

Daya saing daerah adalah kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Peningkatan daya saing daerah didukung dari beberapa aspek, antara lain ketersediaan infrastruktur, kualitas kelembagaan birokrasi, stabilitas ekonomi makro dan sumber daya manusia

Terkait dengan Kebijakan Nasional Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo salah satu fungsinya sebagai pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan koordinasi tugas perangkat daerah, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah ikut mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD (rancangan awal) maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang direncanakan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KINERJA SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menjadi hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik.

Tujuan yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
2. Mewujudkan pemerintahan yang kapabel
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sedangkan sasaran yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo adalah :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel

Dengan indikator kinerja :

- a. Nilai SAKIP
- b. Persentase penanganan anggaran kemiskinan

2. Terwujudnya pemerintahan yang kapabel

Dengan indikator kinerja :

- a. Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
- b. Nilai kematangan Organisasi Daerah (NKOD)
- c. Persentase penerapan TNDE

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dengan indikator kinerja :

- a. Persentase ketercapaian SPM
- b. IKM

3.3 PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Program merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana, yang penjabarannya secara rinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan, dapat bersifat jangka panjang dan menengah antara 3-5 tahun atau bersifat tahunan saja. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 ini mengikuti perubahan regulasi yang sangat frontal terkait dengan nomenklatur Program, Kegiatan dan Penambahan Sub Kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, hal ini disebabkan karena kebijakan serta pertimbangan agar program dan kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan baik dan target yang ditetapkan dapat tercapai, program kegiatan tahun 2025 tersebut antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (**umum**)
- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/Vrifikasi Keuangan SKPD (**Hukum**)

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (**Umum**)
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (**Umum**)
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor (**Umum**)
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (**Umum,**

- Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim)**
- f.** Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - g.** Penyediaan Bahan/Material (**Umum**)
 - h.** Fasilitasi Kunjungan Tamu (**Umum**)
 - i.** Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
- 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a.** Pengadaan mebel (**umum**)
 - b.** Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (**Umum, Kesra, Adbang, pbj, Prokompim**)
 - c.** Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (-)
 - d.** Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (-)
 - e.** Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (**Umum**)
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- a.** Penyediaan jasa surat menyurat (**Umum, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - b.** Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (**Umum**)
 - c.** Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (**Umum, Organisasi**)
 - d.** Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- a.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, PBJ**)
 - b.** Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (**Umum, Perekonomian, Adbang, Organisasi, Prokompim**)
 - c.** Pemeliharaan Mebel (**Umum**)
 - d.** Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (**Umum, Pemerintahan, Kesra, Hukum, Perekonomian, Adbang, PBJ, Organisasi, Prokompim**)
 - e.** Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (**Umum**)
 - f.** Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya (**Umum**)
 - g.** Pemeliharaan aset tetap lainnya (-)
- 6. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum)**
- a.** Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Umum**)
 - b.** Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Umum**)
 - c.** Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**Umum**)

- 2. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Prokompim)**
 - a.** Fasilitasi Keprotokolan
 - b.** Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
 - c.** Pendokumentasian Tugas Pimpinan

Untuk lebih jelasnya tentang target dan kebutuhan dana tahun 2025 dan perkiraan maju tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 5/ 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Wonosobo (Sesuai penempatan Logframe/Aplikasi Pra Renja)

Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tujuan 1. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel									
1.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		WSb		4.440.768.038	PAD			4.440.768.038
		Persentase kesepakatan kerjasama yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama/ rencana kerja	WSb	100%		PAD			
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Wsb	100%		PAD			
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Wsb	100%		PAD			
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah laporan tata pemerintahan yang dihasilkan	Wsb	48 Dokumen	462.366.638	PAD		48 Dokumen	462.366.638
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Wsb	48 Dokumen	76.427.200	PAD		48 Dokumen	76.427.200
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi	Jumlah Dokumen Hasil	Wsb	307	72.409.000	PAD		307	72.409.000

	Daerah	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		Dokumen				Dokumen	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah kesepakatan/ MOU yang difasilitasi	Wsb	15 Dokumen	84.401.400	PAD		15 Dokumen	84.401.400
	Fasilitasi kerjasama Dalam negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Wsb	15 Dokumen	84.401.400	PAD		15 Dokumen	84.401.400
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Kesejahteraan Rakyat yang ditindaklanjuti	Wsb	100%	3.489.000.000	PAD		100%	3.489.000.000
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Wsb	5 Dokumen	3.177.128.200	PAD		5 Dokumen	3.177.128.200
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,	Wsb	6 Dokumen	211.871.800	PAD		6 Dokumen	211.871.800
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Wsb	6 Dokumen	100.000.000	PAD		6 Dokumen	100.000.000
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan		Wsb		2.388.465.675	PAD			2.388.465.675

		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Perekonomian dan SDA yang ditindaklanjuti dengan kebijakan	Wsb	100%		PAD		100%	
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Wsb	100%		PAD		100%	
		persentase rekomendasi hasil koordinasi Bagian Administrasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	Wsb	100%		PAD		100%	
		Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	Wsb	85%		PAD		85%	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian yang tertangani	Wsb	100%	621.296.990	PAD		100%	621.296.990
		Persentase BUMD dengan opini WTP atas pemeriksaan KAP	Wsb	100%	621.296.990	PAD		100%	621.296.990
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Wsb	12 Dokumen	250.000.000	PAD		12 Dokumen	250.000.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Wsb	12 Laporan	371.296.990	PAD		12 Laporan	371.296.990
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kebijakan yang tertangani	Wsb	100%	1.114.352.600	PAD		100%	1.114.352.600
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Wsb	12 Dokumen	1.064.352.600	PAD		12 Dokumen	1.064.352.600
	Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Wsb	100	50.000.000	PAD		100	50.000.000

	Lingkungan Hidup	dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian		Dokumen				Dokumen	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rata rata Capaian kinerja Perangkat Daerah per triwulan	Wsb	85%	337.816.085	PAD		85%	337.816.085
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Wsb	2 Dokumen	37.776.000	PAD		2 Dokumen	37.776.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Wsb	4 Laporan	150.943.748	PAD		4 Laporan	150.943.748
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Wsb	18 Laporan	149.096.337	PAD		18 Laporan	149.096.337
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)		Wsb		1.262.188.785	PAD			1.262.188.785
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71,00 nilai				73.00 nilai	
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	70,00 angka	753.300.000	PAD		71,00 angka	753.300.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Wsb	Dokumen	155.000.000	PAD		Dokumen	155.000.000
Tujuan 2. Mewujudkan Pemerintahan yang kapabel									

1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		WSb		4.440.768.038	PAD			4.440.768.038
		Persentase peraturan daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan bupati	Wsb	100%				100%	
	fasilitasi dan koordinasi hukum	Persentase penyusunan produk hukum, persentase jumlah gugatan yang difasilitasi, nilai JDIH kabupaten	Wsb	100%	405.000.000	PAD		100%	405.000.000
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Wsb	Dokumen	120.000.000	PAD		Dokumen	120.000.000
	Fasilitasi bantuan hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Wsb	Kasus	95.000.000	PAD		Kasus	95.000.000
	Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Wsb	Dokumen	190.000.000	PAD		Dokumen	190.000.000
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan				2.388.465.675	PAD			2.388.465.675
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Wsb	90 %				95%	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Wsb	%	315.000.000	PAD		%	315.000.000
		Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Wsb	9 Nilai				12 Nilai	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	Wsb	71,25 Nilai		PAD		71,5 Nilai	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jas	WSb	12 Dokumen	180.000.000	PAD		12 Dokumen	180.000.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektroni	Wsb	12 Dokumen	55.000.000	PAD		12 Dokumen	5.000.000
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan	Wsb	200 Orang	80.000.000	PAD		200 Orang	80.000.000

		Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa							
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)				1.262.188.785	PAD			1.262.188.785
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71 Nilai				73 Nilai	
	Penataan Organisas	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71 angka	753.300.000	PAD		73 anga	753.300.000
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Wsb	12 Dokumen	300.000.000	PAD		12 Dokumen	300.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Wsb	12 Laporan	298.300.000	PAD		12 Laporan	298.300.000
Tujuan 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Non Urusan)				16.777.338.943	PAD			16.777.338.943
		Persentase aset Sekretariat Daerah dalam kondisi baik	Wsb	100%				100%	
		Persentase Pemenuhan Sarpras pendukung kinerja	Wsb	100%				100%	
		cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Wsb	100%				100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Wsb	100%	369.826.743	PAD		100%	369.826.743
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Wsb	Orang/bln	350.626.743	PAD		Orang/bln	350.626.743
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi	Jumlah Dokumen	Wsb	1 Dokumen	19.200.000	PAD		1 Dokumen	19.200.000

	Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Belanja Administrasi Umum	Wsb	100%	5.184.568.752	PAD		100%	5.184.568.752
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Wsb	7 Paket	95.101.944	PAD		7 paket	95.101.944
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Wsb	9 Paket	251.730.927	PAD		9 Paket	251.730.927
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Wsb	5 Paket	82.421.685	PAD		5 Paket	82.421.685
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Wsb	2 Paket	19.020.389	PAD		2 Paket	19.020.389
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Wsb	9 Paket	280.843.628	PAD		9 Paket	280.843.628
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Wsb	9 Dokumen	77.149.907	PAD		9 Paket	77.149.907
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Wsb	1 Paket	95.101.944	PAD		1 Paket	95.101.944
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Wsb	24 Laporan	1.841.223.328	PAD		24 Laporan	1.841.223.328
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wsb	9 Laporan	2.441.975.000	PAD		9 Laporan	2.441.975.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase realisasi Pengadaan Barang Milik	Wsb	100 %	957.923.000	PAD		100%	957.923.000

	Pemerintah Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Wsb	3 Unit	657.923.000	PAD		3 Unit	657.923.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wsb	3 Unit	-	PAD		3 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wsb	2 Unit	-	PAD		2 Unit	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Wsb	3 Unit	-	PAD		3 Unit	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel yang terpenuhi	Wsb	1 Unit	300.000.000	PAD		1 Unit	300.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	100%	3.846.330.506	PAD		100%	3.846.330.506
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Wsb	9 Laporan	25.635.124	PAD		9 Laporan	25.635.124
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	WSb	18 Laporan	691.078.752	PAD		18 Laporan	691.078.752
	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	Wsb	2 Laporan	76.741.425	PAD		2 Laporan	76.741.425
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa playanan Umum Kantor yang Disediakan	Wsb	8 Laporan	3.052.875.205	PAD		8 Laporan	3.052.875.205

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Wsb	100%	2.755.552.634	PAD		100%	2.755.552.634
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Wsb	3 Unit	597.698.269	PAD		3 Unit	597.698.269
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Wsb	7 Unit	721.736.871	PAD		7 Unit	721.736.871
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Wsb	5 Unit	200.000.000	PAD		5 Unit	200.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Wsb	6 Unit	143.601.295	PAD		6 Unit	143.601.295
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Wsb	5 Unit	997.414.256	PAD		5 Unit	997.414.256
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Wsb	2 Unit	95.101.943	PAD		2 Unit	95.101.943
	Pemeliharaan Aset tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Wsb	1 Unit	-	PAD		1 Unit	-
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan pimpinan	Wsb	100%	1.613.137.308	PAD		100%	1.613.137.308
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala	Wsb	2 Orang/bln	727.616.437	PAD		2 Orang/bln	727.616.437

		Daerah							
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Wsb	10 Paket	250.000.000	PAD		10 Paket	250.000.000
	Pelaksanaan Medical Check Up kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	2 Orang	35.520.871	PAD		2 Orang	35.520.871
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Wsb	2 Orang/bln	600.000.000	PAD		2 Orang/bln	600.000.000
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Wsb	100%	2.050.000.000	PAD		100%	2.050.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Wsb	1 Paket	900.000.000	PAD		1 Paket	900.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Wsb	1 Paket	650.000.000	PAD		1 Paket	650.000.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Wsb	1 Paket	500.000.000	PAD		1 Paket	500.000.000
	Penataan Organisasi	Jumlah kebijakan penataan organisasi yang dipublikasikan	-	-	-	-	-	-	-
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan	-	-	-	-	-	-	-

		Reformasi Birokras							
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	-	-	-	-	-	-	-
		niali kepuasan layanan kehumasan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi pimpinan	-	-	-	-	-	-	-
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	-	-	-	-	-	-	-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Urusan)				1.262.188.785	PAD			1.262.188.785
		Persentase kegiatan pemerintahan daerah yang dipublikasikan	Wsb	100%				100%	
		Rata rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71 Nilai				73 Nilai	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Nilai kepuasan pelayanan pimpinan	WSb	78,20 angka	508.888.785			78,30 angka	508.888.785
		Nilai layanan kehumasan	Wsb	77,00 angka				77,10 angka	
	Fasilitasi keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Wsb	12 Laporan	79.537.025	PAD		12 Laporan	79.537.025
	Fasilitasi komunikasi pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Wsb	12 Laporan	294.020.000	PAD		12 Laporan	294.020.000
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Wsb	12 Laporan	135.331.760	PAD		12 Laporan	135.331.760
	Penataan Organisasi	Rata -rata nilai RB Perangkat Daerah	Wsb	71,00 Angka	753.300.000	PAD		73,00 angka	753.300.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Hasil	Wsb	Laporan	298.300.000	PAD		Laporan	298.300.000

	danTata Laksana	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana							
3.	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		Wsb		4.440.768.038	PAD			4.440.768.038
		Persentase ketercapaian SPM Pelayanan Dasar	WSb						
	Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kebijakan administrasi tata pemerintahan dipublikasikan	Wsb	46 Dokumen	462.366.638	PAD		46 Dokumen	462.366.638
	Penataan administrasi pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Wsb	46 Dokumen	313.530.438	PAD		46 Dokumen	313.530.438

BAB IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 adalah sebagai berikut pada lampiran berikut ini :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Non Urusan), dengan anggaran sebesar Rp16.777.338.943,- terdiri dari:
 - a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan anggaran Rp.369.826.743,-
 - b. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran Rp.5.184.568.752,-
 - c. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran Rp.957.923.000,-
 - d. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp.3.846.330.506,-
 - e. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dengan anggaran Rp.2.755.552.634,-
 - f. Kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan anggaran Rp.1.613.137.308,-
 - g. Kegiatan fasilitasi kerumahtanggaan sekretariat daerah Rp.2.050.000.000,-
2. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Urusan),/ (Program Administrasi Umum) dengan anggaran sebesar Rp.1.262.188.785,- terdiri dari:
 - a. Kegiatan penataan organisasi dengan anggaran Rp.753.300.000,-
 - b. Kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan dengan anggaran Rp.508.888.785,-
3. Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan anggaran sebesar Rp.4.440.768.038,- terdiri dari:
 - a. Kegiatan administrasi tata pemerintahan dengan anggaran Rp.462.366.638,-
 - b. Kegiatan fasilitasi kerjasama daerah dengan anggaran Rp.84.401.400,-
 - c. Kegiatan pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan anggaran Rp.3.489.000.000,-
 - d. Kegiatan fasilitasi dan koordinasi hukum dengan anggaran Rp.405.000.000,-
4. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan anggaran sebesar Rp.2.388.465.675,- terdiri dari:
 - a. Kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian dengan anggaran Rp.621.296.990,-,-
 - b. Kegiatan pemantauan kebijakan sumber daya alam dengan anggaran Rp.1.114.352.600,-
 - c. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan dengan anggaran Rp.337.816.085,-
 - d. Kegiatan pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran Rp.315.000.000,-

Adapun rencana anggaran dan pendanaan dapat dilihat pada lampiran dibawah ini

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan antar Bagian di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo maupun dengan Perangkat daerah yang membidangi fungsi lain.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2025 ini dapat dijadikan pedoman bagi pengelola program dalam menyusun pelaksanaan kegiatan sehingga berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

LAMPPIRAN

(BAB 1V)

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		REKONSTRUKSI SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	850.626.460,00							1.320.720.213,00	
	850.626.460,00							1.320.720.213,00	
	850.626.460,00							1.320.720.213,00	
-	303.858.422,00						-	492.324.417,00	
-	216.999.262,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-	-	385.046.511,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Paket	19.334.200,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		25.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Paket	16.495.062,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		20.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		3.043.262,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Laporan	178.770.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		337.003.249,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
-	59.200.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-	-	67.205.374,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Laporan	59.200.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		67.205.374,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
-	27.659.160,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-	-	40.072.532,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
as Jabatan									

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 Unit	22.659.160,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		35.072.532,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
5 Unit	5.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		5.000.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
-	546.768.038,00						-	828.395.796,00	

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	462.366.638,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-	-	693.047.627,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
6 Dokumen	313.530.438,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		435.696.337,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3 Dokumen	76.427.200,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		98.700.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
4 Dokumen	72.409.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		158.651.290,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	84.401.400,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-	-	135.348.169,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
15 Dokumen	84.401.400,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		135.348.169,00	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH
	850.626.460,00							1.320.720.213,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.666.714.723,00							5.406.380.000,00	
	3.666.714.723,00							5.406.380.000,00	
	3.666.714.723,00							5.406.380.000,00	
-	177.714.723,00						-	306.380.000,00	
-	75.496.037,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-	-	97.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4 Paket	15.371.037,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		18.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
2 Paket	6.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		13.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		1.200.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
4 Laporan	52.925.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		65.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	3.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-	-	100.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

1 Unit	3.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		100.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
--------	--------------	---	------------------------------	---	--	---	--	----------------	--

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	70.288.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-	-	72.180.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
5 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		2.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Laporan	69.288.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		70.180.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
-	28.930.686,00			-	2. Peningk atan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berk arakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkata n kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-	-	37.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

as Jabatan

2023			NASIONAL		DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3 Unit	20.930.686,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		25.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
15 Unit	8.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdayasaing	-		12.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
-	3.489.000.000,00						-	5.100.000.000,00	

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	3.489.000.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-	-	5.100.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	3.177.128.200,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		4.500.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8 Dokumen	211.871.800,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		350.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		250.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH
	3.666.714.723,00							5.406.380.000,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	597.271.500,00							612.271.500,00	
	597.271.500,00							612.271.500,00	
	597.271.500,00							612.271.500,00	
-	192.271.500,00						-	192.271.500,00	
-	19.200.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	19.200.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	19.200.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		19.200.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	144.071.500,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	144.071.500,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Paket	15.117.500,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		15.117.500,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Paket	15.134.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		15.134.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Dokumen	13.820.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		13.820.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		100.000.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
-	1.500.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	1.500.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		1.500.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
-	27.500.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	27.500.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
as Jabatan									
5 Unit	20.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		20.000.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Unit	7.500.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		7.500.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
-	405.000.000,00						-	420.000.000,00	
-	405.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	420.000.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		125.000.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Kasus	95.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		100.000.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	190.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		195.000.000,00	BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
	597.271.500,00							612.271.500,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		REKAMBUK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.892.349.745,00							1.892.349.745,00	
	1.892.349.745,00							1.892.349.745,00	
	1.892.349.745,00							1.892.349.745,00	
-	156.700.155,00						-	156.700.155,00	
-	115.480.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	115.480.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
2 Paket	5.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		5.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 Paket	8.500.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		8.500.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
360 Dokumen	1.980.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		1.980.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
50 Laporan	100.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		100.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
-	29.023.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-	-	29.023.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
160 Laporan	1.600.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		1.600.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	27.423.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		27.423.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	12.197.155,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	12.197.155,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

angan

5 Unit	9.197.155,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		9.197.155,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
--------	--------------	--	--------------------------------------	---	---	---	--	--------------	--

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11 Unit	3.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		3.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
-	1.735.649.590,00						-	1.735.649.590,00	
-	621.296.990,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	621.296.990,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
25 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		250.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15 Laporan	371.296.990,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		371.296.990,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
-	1.114.352.600,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-	-	1.114.352.600,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
25 Dokumen	1.064.352.600,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis	-		1.064.352.600,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	3. Peningk atan keberl anjutan pen gelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam mendukung perekonomi an daerah yang berkel anjutan Pemantapa n pengelola an lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkel anjutan serta pengu rangan risiko bencana	-		50.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH
	1.892.349.745,00							1.892.349.745,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	547.520.767,00							650.436.394,00	
	408.616.572,00							430.085.011,00	
	408.616.572,00							430.085.011,00	
-	70.800.487,00						-	85.193.994,00	
-	12.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	-	-	19.216.690,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
1 Paket	12.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	-		19.216.690,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
-	22.000.000,00			-	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-	-	12.811.127,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
2 Unit	22.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		12.811.127,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	26.800.487,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	-	-	27.543.923,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	1.869.801,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif	-		1.921.669,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	24.930.686,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		25.622.254,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
-	10.000.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-	-	25.622.254,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 Unit	10.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		25.622.254,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
-	337.816.085,00						-	344.891.017,00	
-	337.816.085,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-	-	344.891.017,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
2 Dokumen	37.776.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter	-		40.354.038,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

2023	8	9	10	11	12	NASIONAL	DAERAH	14	15	16	17
4 Laporan	150.943.748,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-				139.476.286,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
19 Laporan	149.096.337,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningka tan tata kelola pem erintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkata n kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-				165.060.693,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
	138.904.195,00									220.351.383,00	
	138.904.195,00									220.351.383,00	
-	138.904.195,00								-	220.351.383,00	

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	95.275.494,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-	-	175.512.439,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
1 Paket	10.275.494,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		32.027.817,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	2.220.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		2.562.225,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Laporan	82.780.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		140.922.397,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
-	43.628.701,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-	-	44.838.944,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
angan									
5 Unit	43.628.701,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing	-		44.838.944,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		REKONSTRUKSI SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PILIHAN KAWASAN PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	538.597.890,00							736.500.000,00	
	538.597.890,00							636.500.000,00	
	538.597.890,00							636.500.000,00	
-	255.500.000,00						-	282.500.000,00	
-	177.500.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	195.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Bulan Paket	19.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		20.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
12 Bulan Paket	17.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		18.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Bulan Dokumen	1.500.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		2.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
12 Bulan Laporan	140.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas	-		155.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

2023					NASIONAL		DAERAH			
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
-	37.600.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	41.500.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	
12 Bulan Laporan	1.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		1.500.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH	

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0 Laporan	36.600.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		40.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
-	40.400.000,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	46.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

as Jabatan

2023			NASIONAL		DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Bulan Unit	20.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		25.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
0 Unit	20.400.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		21.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
-	283.097.890,00						-	354.000.000,00	

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	283.097.890,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	354.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
12 Bulan Dokumen	148.097.890,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		209.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Bulan Dokumen	55.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		60.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
12 Bulan Orang	80.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		85.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
	0,00							100.000.000,00	
	0,00							100.000.000,00	

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	0,00						-	100.000.000,00	
-	0,00			-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	100.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

0 Unit	0,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		100.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH
--------	------	--	--------------------------------------	---	---	---	--	----------------	---

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	34.198.608.389,00							35.938.835.541,00	
	32.898.608.389,00							34.613.835.541,00	
	32.898.608.389,00							34.613.835.541,00	
-	32.898.608.389,00						-	34.613.835.541,00	
-	21.972.015.729,00			-	-	-	-	23.439.632.166,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
105 Orang/bulan	21.972.015.729,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.439.632.166,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
-	1.878.000.000,00			-	-	-	-	2.252.610.715,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
1 Paket	60.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.101.944,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
1 Paket	50.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		63.401.296,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Paket	50.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan berkualitas Penguatan pengembangan ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor pertanian dan pariwisata berbasis potensi dan sumberdaya lokal	-		50.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
1 Paket	10.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.020.389,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
3 Paket	28.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.380.907,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
4 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		44.380.907,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
3 Paket	50.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		95.101.944,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Laporan	1.600.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.841.223.328,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
-	550.000.000,00			-	-	-	-	550.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Unit	300.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		300.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
5 Unit	250.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
-	2.994.956.580,00			-	-	-	-	3.002.956.580,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		11.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
0 Laporan	581.098.080,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		581.098.080,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		24.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	2.386.858.500,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.386.858.500,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
-	1.750.498.772,00			-	-	-	-	1.755.498.772,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

8	9	10	11	NASIONAL	DAERAH	14	15	16	17
16 Unit	500.156.687,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.156.687,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
angan									
24 Unit	500.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
angan									
22 Unit	30.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
angan									
26 Unit	700.342.085,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		700.342.085,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
angan									
8 Unit	20.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
-	1.753.137.308,00			-	-	-	-	1.613.137.308,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
angan									
24 Orang/Bulan	867.616.437,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		727.616.437,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
angan									
2 Paket	250.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		250.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
angan									
2 Orang	35.520.871,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		35.520.871,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24 Orang/Bulan	600.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
-	2.000.000.000,00			-	-	-	-	2.000.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
0 Paket	900.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		900.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
6 Paket	600.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		600.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
5 Paket	500.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
	1.300.000.000,00							1.325.000.000,00	
	1.300.000.000,00							1.325.000.000,00	
-	1.190.000.000,00			-	-	-	-	1.200.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	1.190.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.200.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
-	110.000.000,00			-	-	-	-	125.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
89 Unit	110.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.000.000,00	BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
	34.198.608.389,00							35.938.835.541,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		REKOMENDASI SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	898.660.000,00							941.630.000,00	
	898.660.000,00							941.630.000,00	
	898.660.000,00							941.630.000,00	
100 % 100 angka 100 Persen 70,64 angka 73 angka 73 nilai 73 nilai 90 angka	898.660.000,00						100 % 100 % 73 angka 90 angka 73 nilai 73 nilai 73 angka 73 nilai 100 % 90 angka 73 angka 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 angka 73 angka 72,47 angka 90 angka 73 angka 100 % 73 angka 90 angka 100 % 73 angka	941.630.000,00	
1 Paket	152.400.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo	-	164.640.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1 Paket	20.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		20.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
1 Paket Paket	10.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		10.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		2.640.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24 Laporan	120.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		132.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
1 Laporan	23.760.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo	-	24.240.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		1.100.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5 Unit	25.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		27.500.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
9 Unit	7.500.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		8.250.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
44 Dokumen	690.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo	-	717.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		250.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
4 Laporan	270.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		297.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
12 Dokumen	170.000.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	Kabupaten Wonosobo		170.000.000,00	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
	898.660.000,00							941.630.000,00	

TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		REKAMBUK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.660.560.585,00							0,00	
	1.660.560.585,00							0,00	
	1.660.560.585,00							0,00	
-	1.660.560.585,00						-	0,00	
-	692.433.800,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
7 Paket	92.381.400,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 Paket	135.303.400,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
1460 Dokumen	7.249.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	457.500.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	352.923.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Unit	352.923.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
-	32.615.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 Laporan	1.815.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
1 Laporan	30.800.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
-	73.700.000,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
angan									

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6 Unit	55.000.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
36 Unit	18.700.000,00	Kab. Wonosobo, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
-	508.888.785,00			-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-	-	0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH

2023				NASIONAL	DAERAH				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12 Laporan	79.537.025,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	294.020.000,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
12 Laporan	135.331.760,00	Kab. Wonosobo, Wonosobo, Wonosobo Timur	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif Optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi serta penguatan kondusivitas wilayah	-		0,00	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
	1.660.560.585,00							0,00	